RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Sesanti Angayubagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugrahkan sinar suci sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2026, dapat disusun sebagai penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025-2029, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2026.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Bali, 6 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

Dr.I KETUT SUKRA NEGARA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681129 198903 1 007

DAFTAR ISI

			Halaman
Kata Pengantar			i
Daftar Isi			ii
Bab I	PENDAHULUAN		1
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	4
	1.3.	Maksud dan Tujuan	6
	1.4.	Sistematika Penulisan	7
Bab II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		9
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
	2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
	2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
	2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
Bab III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		33
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
	3.3	Program dan Kegiatan	35
Bab IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		43
Bab V	PENUTUP		44
	Lampiran-lampiran		

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu instrumen yang sangat strategis dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan kapasitas fiskal pemerintah untuk berinvestasi, oleh karenanya peran serta pihak swasta nasional maupun asing sangat diperlukan.

Pelaksanaan penanaman modal dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah ketersediaan potensi Sumber Daya, baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal. Iklim penanaman modal yang kondusif akan menjadi ladang yang subur bagi tumbuh kembangnya investasi di suatu daerah.

Oleh karenanya kebijakan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menjadi penentu minat penanam modal karena para penanam modal menginginkan adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan terhadap modal yang diinvestasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali dalam menarik partisipasi para penanam modal nasional maupun asing untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah Bali telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi UMKM, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Bali.

Untuk meningkatkan nilai tambah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya seperti :

1. Membangun sinergitas promosi investasi dengan Kabupaten/Kota se-Bali untuk menyiapkan bahan promosi yang terintegrasi.
2. Melakukan pendekatan melalui surat ke Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI agar event-event promosi investasi lebih banyak bisa diselenggarakan di Provinsi Bali.
3. Memanfaatkan fasilitas jendela promosi penanaman modal, melaksanakan kajian potensi investasi dengan pihak ketiga yaitu pembuatan video berbasis Informasi dan Teknologi (IT) dengan mengunggah peluang dan potensi investasi daerah pada sistem potensi investasi regional (PIR) yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Potensi Daerah pada Kementerian Investasi/BKPM RI dan INAACCES Kemenlu RI.
4. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali untuk dapat lebih senergitas melakukan promosi baik nasional maupun internasional terhadap peluang dan potensi pariwisata lain yang ada di daerah.
5. Memberikan layanan konsultasi dan memberikan solusi kepada pelaku usaha terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan investasi.
6. Melakukan pembinaan dan evaluasi ke lapangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Memberikan stempel pada setiap produk perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan biaya Rp.0,- dan ditanda tangani secara elektronik (TTE) oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, sehingga izin yang dikeluarkan bersifat transparan dan akuntabel, serta tidak ada peluang terjadinya unsur KKN pada Sistem PRESTISE.
8. Penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik kepada pelaku usaha masyarakat bahwa dalam pengajuan permohonan izin dan non izin tidak dipungut biaya, cepat, mudah dan pasti serta bisa dilaksanakan darimana, kapan saja sepanjang ada internet serta tidak menggunakan calo.

9. Memberikan layanan pendampingan OSS (*Online Single Submission*) kepada pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam penginputan data.
10. Melakukan pelayanan keliling ke sembilan Kabupaten/Kota untuk penerbitan/penyelesaian Nomor Induk Berusaha (NIB), izin dan non izin.
11. Melakukan pengembangan aplikasi perizinan dan non perizinan (*prestise*).
12. Melakukan fasilitasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dengan menghadirkan narasumber secara langsung.
13. Penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat dan staf dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
14. Tidak korupsi sesuai arahan yang ditetapkan, pemasangan CCTV, banner dan lain-lain di beberapa titik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
15. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana prasarana.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menyusun Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja OPD) Sesuai dengan pasal 1 ayat (30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan masukan untuk Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali. Melalui Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Renja disempurnakan menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah selanjutnya sebagai bahan Musrenbang RKPD. Setelah RKPD ditetapkan melalui Peraturan Kepala daerah, maka Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disempurnakan selanjutnya dikirim Kepada Bappeda Provinsi Bali untuk diverifikasi. Bila hasil verifikasi dari Bappeda Provinsi Bali memandang bahwa Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sinkron dengan RKPD, maka Bappeda Provinsi Bali mengirim Renja Dinas Perangkat Daerah ke Gubernur melalui Sekretariat Daerah Provinsi Bali untuk ditetapkan menjadi Renja Perangkat Daerah. Renja

Perangkat Daerah yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di masing-masing perangkat daerah.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

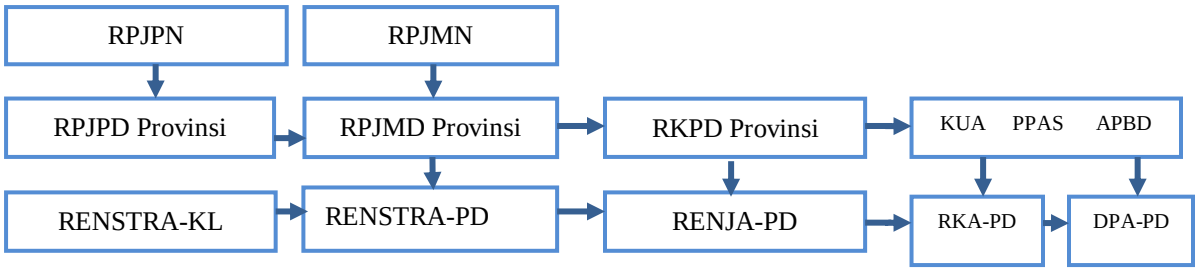

1.2. Landasan hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2026 adalah :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
12) Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
13) Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 35).

1.3 Maksud dan Tujuan.

Sebagaimana diuraikan di depan bahwa Renja Perangkat daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat daerah dan Renja Perangkat Daerah wajib sinkron dengan RKPD, maka maksud penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2026 adalah menjabarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yang masih pada tahap Rancangan Renstra khususnya rencana kerja Tahun 2026, serta sebagai bahan masukan pada penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2026 adalah :

1) Merancang program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebutuhan Dana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2026.

2) Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2026 dengan Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025-2029.
3) Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2026 dengan RKPD Provinsi Bali Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan gubernur dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada Bab ini diuraikan tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi: 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, 3) Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab III Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut: 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, dan 3) Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab IV Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali diuraikan terkait rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan antara lain: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dalam BAB II Tentang Hasil Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun Lalu (Tahun 2024) berisi: 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali pada Tahun 2024 melaksanakan urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi wewenang Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas, dan
e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data tahun 2024, komposisi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah :

Tabel.2.1
Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	2
2	Strata 2	21
3	Strata 1	27
4	Diploma III	3
5	Diploma II	-
6	SLTA / Sederajat	7
7	SLTP / Sederajat	-
8	SD	-
Total		**60**

Tabel.2.2
Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	18
2	Golongan III	35
3	Golongan II	5
4	Golongan I	-
5	Golongan IX (PPPK)	1
6	Golongan VII (PPPK)	1
Total		**60**

Tabel.2.3
Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	1
4	Fungsional ahli madya	4
5	Fungsional ahli muda	16
6	Fungsional ahli pertama	1
7	Staf	34
8	Fungsional mahir (PPPK)	1
9	Fungsional terampil (PPPK)	1
Total		**60**

Tabel.2.4
Aset Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

NO	URAIAN ASET/MODAL	UKURAN	KETERANGAN
1	Tanah	1.610 M^2	
2	Gedung dan Bangunan:		
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	750 M^2	
	- Bangunan Gedung Tertutup Permanen	40 M^2	
	- Bangunan Kantor Lain-lain/Semi Permanen	90 M^2	
	- Bangunan Gedung lain-lain	13 M^2	
3	Mobil Minibus		
	- DK 382 I	1781 CC	Kondisi Kurang Baik
	- DK 1383 I	1781 CC	Kondisi Baik
	- DK 1381 I	1493 CC	Kondisi Kurang Baik
	- DK 384 I	1300 CC	Kondisi Baik
	- DK 1382 I	1998 CC	Kondisi Baik
	- DK 1395 A	1300 CC	Kondisi Baik
	- DK 380 I	1300 CC	Kondisi Baik
	- DK 1380 I	1998 CC	Kondisi Baik
	- DK 385 I	1300 CC	Kondisi Baik
	- DK 38	1998 CC	Kondisi Baik
	- DK 1092 D	1998 CC	Kondisi Baik
4	Sepeda Motor		
	- DK 2903 A	125 CC	Kondisi Baik
	- DK 2880 A	125 CC	Kondisi Baik
	- DK 2870 A	125 CC	Kondisi Baik
	- DK 3877 A	125 CC	Kondisi Baik
	- DK 3288 C	125 CC	Kondisi Baik
	- DK 3280 C	125 CC	Kondisi Baik

	- DK 3266 A	125 CC	Kondisi Kurang Baik
	- DK 2105 D	125 CC	Kondisi Baik
	- DK 6859	86 CC	Kondisi Kurang Baik
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan :		
	- Jaringan Telp. Diatas Tanah Kapasitas Sedang	$500\ M^2$	
	- Instalasi gardu listrik distribusi kapasitas sedang	$150\ M^2$	
	- Jaringan telepon diatas tanah lain-lain	$121\ M^2$	
	- Jaringan telepon diatas tanah lain-lain	$600\ M^2$	
6	Perencanaan bangunan gedung mal perizinan DED	$6\ M^2$	

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali dalam Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 6 program, 11 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 akan diuraikan secara detail berikut ini:

Tabel 2.5

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan				
					Narasi	Satuan	Kinerja		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Program Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**14.861.949.523,00**	**13.834.786.847,00**	**93,09**	**Nilai evaluasi manajemen kinerja**	**Nilai**	**78,5**	**84,46**	**100**
1	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.432.519.443,00	11.568.170.432,00	93,05	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Dokumen	44	44	100
	Sub Kegiatan: - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12.432.519.443,00	11.568.170.432,00	93,05	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	70	58	82,85
2	Kagiatan: Administrasi umum perangkat daerah	368.294.300,00	312.266.173,00	84,79	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	100
	Sub Kegiatan: - Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	12.599.100,00	12.573.600,00	99,80	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	1	100
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	54.132.600,00	41.928.900,00	77,46	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100
	- Penyediaan bahan logistik kantor	72.500.000,00	72.027.500,00	99,35	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	3	3	100
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.014.600,00	13.559.900,00	90,31	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	1	100
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	214.048.000,00	172.176.273,00	80,44	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	2	2	100

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan				
					Narasi	Satuan	Kinerja		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.076.000,00	1.042.500,00	96,89	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	10	4	40
	Sub Kegiatan: - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1.076.000,00	1.042.500,00	96,89	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	10	4	40
4	Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.471.479.080,00	1.458.991.442,00	99,15	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Dokumen	1	1	100
	Sub Kegiatan: - Penyediaan jasa surat menyurat	2.472.000,00	2.060.000,00	83,33	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	100
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150.000.000,00	144.693.010,00	96,46	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	2	2	100
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.319.007.080,00	1.312.238.432,00	99,49	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1	100
5	Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	588.580.700,00	494.316.300,00	83,98	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	20	20	100
	Sub kegiatan: - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	549.440.700,00	455.639.800,00	82,93	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	20	20	100
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	39.140.000,00	38.676.500,00	98,82	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	10	10	100

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan				
					Narasi	Satuan	Kinerja		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	**Program pengembangan iklim penanaman modal**	**480.968.560,00**	**401.973.560,00**	**83,58**	**Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)**	**Proyek**	**12.350**	**55.762**	**100**
1	Kegiatan: Pembuatan peta potensi investasi provinsi	480.968.560,00	401.973.560,00	83,58	Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	Dokumen	2	2	100
	Sub kegiatan: Penyusunan peta potensi investasi provinsi	480.968.560,00	401.973.560,00	83,58	Jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi	Dokumen	2	2	100
III	**Program promosi penanaman modal**	**260.993.800,00**	**160.484.999,00**	**61,49**	**Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali**	**Persen**	**33**	**33**	**100**
1	Kegiatan: Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	260.993.800,00	160.484.999,00	61,49	Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	Dokumen	2	1	50
	Sub kegiatan: Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	260.993.800,00	160.484.999,00	61,49	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	Dokumen	1	1	100
IV	**Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal**	**1.143.149.560,00**	**912.624.560,00**	**79,83**	**Nilai investasi**	**Triliun**	**11,5**	**36,52**	**100**
1	Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	1.143.149.560,00	912.624.560,00	79,83	Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	Persen	91	176	100
	Sub Kegiatan: Pengawasan penanaman modal	297.725.000,00	164.938.000,00	55,40	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha.	Kegiatan usaha	100	72	72

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan				
					Narasi	Satuan	Kinerja		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	299.590.560,00	213.002.560,00	71,10	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kegiatan usaha	13	14	100
	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	545.834.000,00	534.684.000,00	97,96	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis /sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku usaha	325	960	100
V	**Program pelayanan penanaman modal**	**614.087.820,00**	**602.667.820,00**	**98,14**	**Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku**	**Persen**	**100**	**100**	**100**
1	Kegiatan: Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota	458.901.400,00	458.901.400,00	100	Persentase jenis izin dan non izin yang terbit sesuai kewenangan provinsi	Persen	100	100	100
	Sub kegiatan : Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	458.901.400,00	458.901.400,00	100	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Pelaku usaha	400	5.677	100
2	Kegiatan: Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	155.186.420,00	143.766.420,00	92,64	Persentase jenis izin dan non izin yang dilayani sesuai kewenangan provinsi	Persen	100	100	100
	Sub kegiatan: Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	155.186.420,00	143.766.420,00	92,64	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Pelaku usaha	10	578	100
VI	**Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**106.084.280,00**	**106.084.280,00**	**100**	**Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan**	**Persen**	**100**	**100**	**100**

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan				
					Narasi	Satuan	Kinerja		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kegiatan: Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	106.084.280,00	106.084.280,00	100	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Dokumen	2	2	100
	Sub kegiatan: Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	106.084.280,00	106.084.280,00	100	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Dokumen	2	2	100
	JUMLAH PROGRAM: 6								
	JUMLAH KEGIATAN : 11								
	JUMLAH SUB KEGIATAN : 20	***17.467.233.543,00***	***16.018.622.066,00***	***91,71***					

Beberapa hal penting dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 adalah;

1). Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja capaian program yang direncanakan

Dari 6 program, 11 kegiatan dan 20 sub kegiatan, realisasi capaian program secara keseluruhan tercapai bahkan melebihi target kinerja yang direncanakan.

2). Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi/ melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 6 program, 11 kegiatan dan 20 sub kegiatan, realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
   - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
   - Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
     a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
     b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
     c) Penyediaan bahan logistik kantor
     d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
     e) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
   - Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
     a) Penyediaan jasa surat menyurat
     b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
     c) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
   - Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
     a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
     b) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
2. Program pengembangan iklim penanaman modal
   - Kegiatan pembuatan peta potensi investasi provinsi dengan sub kegiatan penyusunan peta potensi investasi provinsi

3. Program promosi penanaman modal dengan sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi .
4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
   - Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi dengan sub kegiatan sebagai berikut:
     a) Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
     b) Bimbingan teknis kepada pelaku usaha
5. Program pelayanan penanaman modal
   a. Kegiatan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik
   b. Kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi dengan sub kegiatan penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
6. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
   - Kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi dengan sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

3) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
   - Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak tercapai target yang direncanakan karena pelaksanaan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
   - Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Tidak tercapainya kegiatan/sub kegiatan tersebut karena efisiensi anggaran.

2. Program promosi penanaman modal
   - Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi. Tidak tercapainya kegiatan tersebut karena sisa anggaran jasa iklan/reklame, film dan pemotretan Rp.50.000.000,00 dan efisiensi anggaran perjalanan dinas biasa Rp. 22.565.196,00
3. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, sub kegiatan pengawasan penanaman modal tidak tercapai target karena alamat pelaku usaha sesuai daftar banyak yang tidak bisa dihubungi/alamat tidak ditemukan.

4). Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk peningkatan capaian kinerja

Langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depannya dalam upaya peningkatan capaian kinerja yaitu sebagai berikut:

a) Membuat perencanaan yang lebih detail dan cermat.
b) Membangun kolaborasi/kerjasama dengan tim dan pihak-pihak terkait untuk mempercepat terealisasinya kegiatan.
c) Melaksanakan kegiatan secara pararel agar penyelesaiannya tepat waktu.

Data hasil evaluasi disajikan dalam lampiran 1 tabel 2.6 terlampir

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tergolong baik, secara umum realisasi keuangan di tahun 2024 sebesar Rp.16.018.622.066,00 atau 91,71% dari target Rp. 17.467.233.543,00.

Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut: Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali merupakan Dinas yang tidak mengukur kinerjanya berdasarkan SPM, tetapi menggunakan NSPK dan IKK serta IKU. Norma Standar Prosedur Kegiatan telah dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, IKU sebagai ukuran keberhasilan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.7. Jenis indikator yang dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk jelasnya berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
Tahun 2024

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra Perangkat daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai investasi	-	✓	15,21T	15,56 T									
	Persentase peningkatan nilai investasi/ penanaman modal di luar sarbagita	-	✓			14%	18 %		10,24%	19,39%				
	Persentase peningkatan nilai investasi/ penanaman modal	-	✓					4,55%			93,05%	6,96%	1,89%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	✓			87,5 (skore)	88 (Skore)		93,68 (skore)	92,128 (skore)				
	Indeks pelayanan publik perizinan dan non perizinan	-	✓	86,5 (skore)	87 (Skore)									
	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan							88,50 (nilai)			93,594 (nilai)	89,00 (nilai)	93,65 (nilai)	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun Isu – Isu yang berkembang Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya nilai investasi.
b. Belum optimalnya sistem perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan.

Dari isu strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Hal ini ditunjukkan dari realisasi penanaman modal cenderung terkonsentrasi di wilayah Sarbagita, selain itu pelaksanaan ketentuan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanaman modal belum efektif, serta kurangnya pemetaan potensi dan promosi potensi penanaman modal di luar Sarbagita.
2) Dalam pelaksanaan pengawasan perizinan terintegrasi melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) belum optimal sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Sedangkan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu penyesuaian dan penyempurnaan SOP serta pengembangan sistem Prestise.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2026 merupakan pedoman penyempurnaan Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) bagi Perangkat Daerah Tahun 2026. Dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, rancangan awal RKPD Provinsi Bali juga merupakan landasan dalam penyempurnaan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang akan memuat program, kegiatan, indikator, target serta pagu indikatif.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 akan dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dalam hal ini antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan baik dilihat dari program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja serta pagu anggaran ada perbedaan. Maka secara detail tabel review Rancangan Awal RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.8. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai evaluasi manajemen kinerja	79,5	18.916.127.460	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Outcome: Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah Provinsi)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	84,75 (nilai)	31.889.212.000	
						Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	4 dokumen	200.000.000	
						Sub kegiatan: Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	200.000.000	
	Kegiatan: Administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan	40 dokumen	15.130.595.620	Kegiatan: Administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan	40 dokumen	26.911.715.114	

	Sub kegiatan: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/bulan	15.130.595.620	Sub kegiatan: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/bulan	26.911.715.114	
	Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	501.109.900	Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	844.170.000	
						Sub kegiatan: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	10.000.000	
	Sub kegiatan: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.073.400	Sub kegiatan: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	28.000.000	
	Sub kegiatan: Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	73.134.300	Sub kegiatan: Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	300.000.000	
	Sub kegiatan: Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	70.000.000	Sub kegiatan: Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	87.000.000	
	Sub kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	25.516.200	Sub kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	40.000.000	

	Sub kegiatan: Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	327.386.000	Sub kegiatan: Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	379.170.000	
	Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah barang milik daerah yang diadakan	20 unit	801.193.000	Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah barang milik daerah yang diadakan	20 unit	1.192.999.280	
	Sub kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20 unit	801.193.000	Sub kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20 unit	1.192.999.280	
	Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 dokumen	1.475.820.930	Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 dokumen	1.298.000.000	
	Sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	3.846.500	Sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	8.000.000	
	Sub kegiatan: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 laporan	152.000.000	Sub kegiatan: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 laporan	190.000.000	
	Sub kegiatan: Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1.319.974.430	Sub kegiatan: Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1.100.000.000	

	Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	20 unit	1.007.408.010	Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	20 unit	1.442.327.606	
	Sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 unit	535.243.050	Sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 unit	800.000.000	
	Sub kegiatan: Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	61.429.900	Sub kegiatan: Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	130.000.000	
	Sub kegiatan: Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	410.735.060	Sub kegiatan: Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	512.327.606	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	13.000 proyek	415.186.230	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Outcome: Meningkatnya potensi dan peluang penanaman modal dan kemudahan berusaha)		Jumlah peta potensi investasi Jumlah UMKM yang difasilitasi bekerjasama dengan usaha besar	1 dokumen 2 dokumen	699.998.500	

						Kegiatan: Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi		Jumlah kemitraan yang difasilitasi	2 dokumen	299.999.500	
						Sub kegiatan: Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 dokumen	299.999.500	
	Kegiatan: Pembuatan peta potensi investasi provinsi		Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	2 dokumen	415.186.230	Kegiatan: Pembuatan peta potensi investasi provinsi		Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	1 dokumen	399.999.000	
	Sub kegiatan: Penyusunan peta potensi investasi provinsi	semua kota/kab semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi	2 dokumen	415.186.230	Sub kegiatan: Penyusunan peta potensi investasi provinsi	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi	1 dokumen	399.999.000	
3	Program Promosi Penanaman Modal		Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	34 persen	151.553.520	Program Promosi Penanaman Modal (Outcome: Meningkatnya pemasaran penanaman modal di Provinsi Bali)		Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	16,92 persen	879.000.000	

	Kegiatan: Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	1 dokumen	151.553.520	Kegiatan: Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	2 dokumen	879.000.000	
	Sub kegiatan: Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	semua kota/kab semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	1 dokumen	151.553.520	Sub kegiatan: Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	1 dokumen	529.000.000	
						Sub kegiatan: Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kewenangan Provinsi	1 dokumen	350.000.000	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 persen	818.735.740	Program Pelayanan Penanaman Modal (Outcome: : Meningkatnya pelayanan dan pengawasan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan serta penanganan pengaduan)		Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 persen	558.737.740	
	Kegiatan: Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah Kabupaten/Kota		Persentase jenis izin dan non izin yang terbit sesuai kewenangan Provinsi	100 persen	818.735.740	Kegiatan: Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah Kabupaten/Kota		Persentase jenis izin dan non izin yang terbit sesuai kewenangan Provinsi	100 persen	558.737.740	

	Sub kegiatan: Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	semua kota/kab semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	400 pelaku usaha	667.234.100	Sub kegiatan: Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	400 pelaku usaha	410.482.140	
	Sub kegiatan: Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	semua kota/kab semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	10 pelaku usaha	151.501.640	Sub kegiatan: Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	semua kota/kab semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	10 pelaku usaha	148.255.600	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Nilai investasi	13,2 T	423.606.230	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Outcome: Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal)		Realisasi investasi	13,2 T	923.605.940	
	Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	93 persen	423.606.230	Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	93 persen	923.605.940	

	Sub kegiatan: Pengawasan penanaman modal	semua kota/kab semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	18 kegiatan usaha	134.560.000	Sub kegiatan: Pengawasan penanaman modal	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	18 Kegiatan usaha	416.578.000	
	Sub kegiatan: Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	semua kota/kab semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	13 Kegiatan usaha	150.146.230	Sub kegiatan: Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	13 kegiatan usaha	256.845.000	
	Sub kegiatan: Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	semua kota/kab semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	40 pelaku usaha	138.900.000	Sub kegiatan: Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	40 pelaku usaha	250.182.940	

6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100 persen	274.790.820	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Outcome: Meningkatnya data dan informasi penanaman modal dan perizinan)		Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah Provinsi	100 persen	352.999.700	
	Kegiatan: Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi		Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	2 dokumen	274.790.820	Kegiatan: Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi		Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	2 dokumen	352.999.700	
	Sub kegiatan: Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	semua kota/kab semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2 dokumen	274.790.820	Sub kegiatan: Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2 dokumen	352.999.700	
			Total		**21.000.000.000**			**Total**		**35.303.553.880**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat diuraikan terkait hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi. Atas masukan dan saran tersebut belum bisa dilakomodir ke dalam dokumen perencanaan (Renja) karena sudah dipetakan oleh peraturan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Berikut usulan beberapa kegiatan/sub kegiatan sebagaimana terlampir.

Tabel 2.9

Usulan kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Promosi Penanaman Modal				
	Kegiatan: Pembentukan Business Hub dan Business Center	-	-	-	Masukan hanya pada kegiatan
2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
	Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi				
	Sub Kegiatan: Pengawasan dan pembinaan penanaman modal	-	-	-	Masukan hanya pada sub kegiatan
3	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				
	Kegiatan: Pembentukan sistem pengelolaan data terpadu dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	-	-	-	Masukan pada kegiatan
	Kegiatan: Penerbitan publikasi investasi terpadu Provinsi Bali (hard copy dan online)	-	-	-	
	Kegiatan: Melakukan kajian tentang kontribusi investasi pemerintah dan swasta (PMDN dan PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDRB Provinsi Bali (*Impact Analysis)*	-	-	-	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab III Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut: 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan 3) Program dan Kegiatan.

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) disusun kebijakan Penanaman Modal. Penjabaran lebih lanjut kebijakan penanaman modal diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Adapun prioritas nasional tahun 2026 sebagai acuan dan pedoman dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2026 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah Ekonomi Kerthi Bali; pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian dan perdagangan, UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital serta pariwisata.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Melalui Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yang baru sampai tahap Rancangan Renstra, yang penentuannya didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 sudah sampai tahap Rancangan Akhir RPJMD. Adapun isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yaitu:

1) Belum optimalnya nilai investasi.
2) Belum optimalnya sistem perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan.

Dalam upaya mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yang sudah sampai tahap Rancangan Akhir, Visi Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”. Dari dua puluh dua (22) Misi Kepala Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengampu Misi 14 yaitu membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil dan makmur, selain mengampu Misi 14, juga selaku pendukung Misi 22 yaitu memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti dan murah. Dari Visi dan Misi tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengacu pada Tujuan 14 (empat belas) yaitu meningkatkan laju perekonomian Bali berbasis ekonomi Kerthi Bali dan Tujuan 22 (dua puluh dua) yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Sasaran yang menjadi acuan sasaran 14.1 yaitu meningkatnya investasi daerah dan sasaran 22.3 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melalui Renstra periode 2025-2029 yang baru sampai tahap rancangan, menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran yaitu terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan yaitu persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal dan indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, menetapkan dua sasaran yaitu :

a. Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.3.Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran, dikembangkan program, kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD. Diupayakan untuk mendorong investasi yang berpihak kepada kearifan lokal dalam upaya memeratakan pertumbuhan investasi antar wilayah dan sektor dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota Se-Bali. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatiff
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01			Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Outcome: Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah Provinsi)	Nilai evaluasi manajemen kinerja		84,75 (nilai)	31.889.212.000			84,85 (nilai)	20.721.000.000
2	18	01	1	01	Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja		4 dokumen	200.000.000			4 dokumen	250.000.000
2	18	01	1	01.0001	Sub kegiatan: Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	4 dokumen	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 dokumen	250.000.000
x	xx	01	1.02		Kegiatan: Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan		40 dokumen	26.911.715.114			40 dokumen	15.431.926.600
x	xx	01	1.02	0001	Sub kegiatan: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	100 orang/bulan	26.911.715.114	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah		100 orang/bulan	15.431.926.600

										dengan Perjanjian Kinerja			
2	18	01	1.06		Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah		100 persen	844.170.000			100 persen	1.236.073.400
2	18	01	1.06	0006	Sub kegiatan: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	2 dokumen	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 dokumen	11.000.000
x	xx	01	1.06	0001	Sub kegiatan: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	1 paket	28.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 paket	5.073.400
x	xx	01	1.06	0002	Sub kegiatan: Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	3 paket	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 paket	500.000.000
x	xx	01	1.06	0004	Sub kegiatan: Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	2 paket	87.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 paket	200.000.000
x	xx	01	1.06	0005	Sub kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	1 paket	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 paket	20.000.000
x	xx	01	1.06	0009	Sub kegiatan: Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	2 laporan	379.170.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 laporan	500.000.000
x	xx	01	1.07		Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan		20 unit	1.192.999.280			20 unit	1.500.000.000

x	xx	01	1.07	0010	Sub kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	20 unit	1.192.999.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 unit	1.500.000.000
x	xx	01	1.08		Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah		1 dokumen	1.298.000.000			1 dokumen	1.603.000.000
x	xx	01	1.08	0001	Sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	1 laporan	8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 laporan	3.000.000
x	xx	01	1.08	0002	Sub kegiatan: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	2 laporan	190.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 laporan	200.000.000
x	xx	01	1.08	0004	Sub kegiatan: Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	1 laporan	1.100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 laporan	1.400.000.000
x	xx	01	1.09		Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		20 unit	1.442.327.606			20 unit	700.000.000
x	xx	01	1.09	0001	Sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	20 unit	800.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 unit	300.000.000
x	xx	01	1.09	0006	Sub kegiatan: Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	25 unit	130.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25 unit	300.000.000
x	xx	01	1.09	0009	Sub kegiatan: Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	2 unit	512.327.606	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 unit	100.000.000

2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Outcome: Meningkatnya potensi dan peluang penanaman modal dan kemudahan berusaha)	Jumlah peta potensi investasi Jumlah UMKM yang difasilitasi bekerjasama dengan usaha besar		1 dokumen 2 dokumen	699.998.500			2 dokumen 2 dokumen	275.000.000
2	18	02	1.01		Kegiatan: Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Jumlah kemitraan yang difasilitasi		2 dokumen	299.999.500			2 dokumen	100.000.000
2	18	02	1.01	0003	Sub kegiatan: Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	2 dokumen	299.999.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 dokumen	100.000.000
2	18	02	1.02		Kegiatan: Pembuatan peta potensi investasi provinsi	Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha		1 dokumen	399.999.000			2 dokumen	175.000.000
2	18	02	1.02	0005	Sub kegiatan: Penyusunan peta potensi investasi provinsi	Jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	1 dokumen	399.999.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	175.000.000
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal (Outcome: Meningkatnya pemasaran penanaman modal di Provinsi Bali)	Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali		16,92 persen	879.000.000			18,46 persen	350.000.000

2	18	03	1.01		Kegiatan: Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal		2 dokumen	879.000.000			2 dokumen	350.000.000
2	18	03	1.01	0002	Sub kegiatan: Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	Semua Kota/Kab semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	1 dokumen	529.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	250.000.000
2	18	03	1.01	0003	Sub kegiatan: Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	1 dokumen	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD		1 dokumen	100.000.000
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal (Outcome: Meningkatnya pelayanan dan pengawasan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan serta penanganan pengaduan)	Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		100 persen	558.737.740			100 persen	945.000.000
2	18	04	1.01		Kegiatan: Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis izin dan non izin yang terbit sesuai kewenangan provinsi		100 persen	558.737.740			100 persen	945.000.000
2	18	04	1.01	0006	Sub kegiatan: Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Semua Kota/Kab semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	400 pelaku usaha	410.482.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		405 pelaku usaha	644.000.000

2	18	04	1.01	0008	Sub kegiatan: Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Semua Kota/Kab semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	10 pelaku usaha	148.255.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 pelaku usaha	301.000.000
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Outcome: Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal)	Realisasi investasi		13,2 T	923.605.940			14,00 T	750.000.000
2	18	05	1.01		Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal		93 persen	923.605.940			93 persen	750.000.000
2	18	05	1.01	0004	Sub kegiatan: Pengawasan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Semua Kota/Kab semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	18 kegiatan usaha	416.578.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 kegiatan usaha	300.000.000
2	18	05	1.01	0005	Sub kegiatan: Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Semua Kota/Kab semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	13 kegiatan usaha	256.845.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 kegiatan usaha	187.500.000

2	18	05	1.01	0006	Sub kegiatan: Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Semua Kota/Kab semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	40 pelaku usaha	250.182.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 pelaku usaha	262.500.000
2	18	06			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Outcome: Meningkatnya data dan informasi penanaman modal dan perizinan)	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah Provinsi		100 persen	352.999.700			100 persen	288.530.361
2	18	06	1.01		Kegiatan: Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi		2 dokumen	352.999.700			2 dokumen	288.530.361
2	18	06	1.01	0002	Sub kegiatan: Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Semua Kota/Kab semua kecamatan, semua kelurahan/ Desa	2 dokumen	352.999.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 dokumen	288.530.361
Total									**35.303.553.880**				**23.329.530.361**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali terlampir dalam lampiran 2.

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2026 disusun sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026, dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

a. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran yaitu tingkat prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dan asas manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat/ pelaku usaha.
b. Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
   - Dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2026 memuat rencana kebijakan serta rencana program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.
   - Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan dibantu oleh Sekretaris dan Jabatan Fungsional yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
   - Keberadaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali diintegrasikan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
c. Rencana tindak lanjut yang diupayakan dalam penerapan kaidah-kaidah pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan agar target yang direncanakan dapat tercapai sesuai perencanaan dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta sarana prasarana yang memadai.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali disusun, semoga dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2026.

Lampiran 1

Tabel 2.6

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*
Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat derah 2024	Realisasi Renja Perangkat derah 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pilihan									
2.12	Penanaman Modal									
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	***Nilai Evaluasi Managemen Kinerja***	78	84,21	78,5	84,46	100%	79 (nilai)	N/A	N/A
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja								
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis dokumen perencanaan yang disusun								
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA yang sudah diinput ke dalam SIPD								
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	100%	40 dokumen	18 dokumen	45%
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah data yang dikumpulkan dan diperiksa terkait pengelolaan gaji								
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	80 orang/bulan	80 orang/bulan	70 orang/bulan	58 orang/bulan	83%	105 orang/bulan	94 orang/bulan	89,5%
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen data pengeluaran kinerja								
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah data/bahan keuangan yang dikumpulkan dan transaksi keuangan yang dijurnal di SIPKD								
	- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan yang diklasifikasi dan diperiksa untuk penyusunan laporan keuangan								
	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	65%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan								
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat derah 2024	Realisasi Renja Perangkat derah 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
				- Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
				- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
				- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	9 Unit	8 Unit	10 unit	4 unit	40%			
				- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	9 Unit	8 Unit	10 unit	4 unit	40%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
				- Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
				- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
				- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	12 Unit	60%
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	8 Unit	40%
				- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10 Unit	10 Unit						
				- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	6 Unit	60%
				Program Promosi Penanaman Modal	***Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan***	30,34%	395,86%	33%	33%	100%	33,5%	16 %	47,76%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat derah 2024	Realisasi Renja Perangkat derah 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					penanaman modal di Provinsi Bali								
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	50%	1 dokumen	0	0
				- Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0
				- Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen						
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	***Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita***	18%	19,39%						
				Program Pengembangangan Iklim Penanaman Modal	***Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)***			12.350 proyek	55.762 proyek	100%	12.650 proyek	31.371 proyek	100%
				Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Tersedianya produk hukum daerah	2 dokumen	2 dokumen						
				- Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 Dokumen	2 Dokumen						
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	0	0
				- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen						
				- Penyusunan peta potensi investasi provinsi	Jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi			2 Dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	0	0
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	***Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal***	92 %	108,5%						
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	***Nilai investasi***			11,5 T	36,52 T	100%	12,3 T	12,26 T	99,67%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat derah 2024	Realisasi Renja Perangkat derah 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	92 %	92 %	91%	176%	100%	92%	79%	85,86%
				- Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	40 Kegiatan usaha	800 kegiatan usaha						
				- Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	360 Perusahaan	800 Perusahaan						
				- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	100 Perusahaan	117 perusahaan						
				- Pengawasan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha			100 Kegiatan usaha	72 Kegiatan usaha	72 %	18 Kegiatan usaha	10 Kegiatan usaha	55,6%
				- Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya			13 Kegiatan usaha	14 Kegiatan usaha	100%	13 Kegiatan usaha	6 Kegiatan usaha	46,15%
				- Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis /sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko			325 Pelaku usaha	960 Pelaku usaha	100%	40 Pelaku usaha	40 Pelaku usaha	100%
				Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	***Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan***	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat derah 2024	Realisasi Renja Perangkat derah 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				- Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2 Dokumen	2 Dokumen						
				- Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan			2 Dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	0	0
				Program pelayanan penanaman modal	***Indeks kepuasan masyarakat***	88 (skore)	92,128 (skore)						
				Program Pelayanan Penanaman Modal	***Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku***			100%	100%	100%	100%	60%	60%
				Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota	Persentase jenis izin dan non izin yang terbit sesuai kewenangan provinsi			100%	100%	100%	100%	60%	60%
				Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase jenis izin dan non izin yang dilayani sesuai kewenangan Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%			
				- Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang terfasilitasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan daerah provinsi	400 Kegiatan usaha	81 kegiatan usaha						
				- Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelakuu usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik			400 Pelaku usaha	5.677 Pelaku usaha	100%	400 Pelaku usaha	1.999 Pelaku usaha	100%
				- Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik			10 Pelaku usaha	578 Pelaku usaha	100%	10 Pelaku usaha	114 Pelaku usaha	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat derah 2024	Realisasi Renja Perangkat derah 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				- Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah provinsi	25 Orang	11 orang						

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						35.303.553.880,00							23.329.530.361,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						35.303.553.880,00							23.329.530.361,00
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						35.303.553.880,00							23.329.530.361,00
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH [Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi]	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85.45	84.46	79	84.75 (nilai)	31.889.212.000,00						84,85 (nilai)	20.721.000.000,00
	2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				4 dokumen	200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		4 dokumen	250.000.000,00
	2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	200.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	4 dokumen	250.000.000,00
	x	xx	01	1.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan				40 dokumen	26.911.715.114,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		40 dokumen	15.431.926.600,00
	x	xx	01	1.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

							Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				100 orang/bulan	26.911.715.114,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	100 orang/ bulan	15.431.926.600,00
	2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	844.170.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	100 persen	1.236.073.400,00
	2	18	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	2 dokume n	11.000.000,00
	x	xx	01	1.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor													
							Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 paket	28.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 paket	5.073.400,00
	x	xx	01	1.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor													
							Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				3 paket	300.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	3 paket	500.000.000,00
	x	xx	01	1.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor													
							Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				2 paket	87.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	3 paket	200.000.000,00
	x	xx	01	1.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan													

							Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	40.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 paket	20.000.000,00
	x	xx	01	1.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD													
							Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				2 laporan	379.170.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	2 laporan	500.000.000,00
	x	xx	01	1.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan				20 Unit	1.192.999.280,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	20 unit	1.500.000.000,00
	x	xx	01	1.07	0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya													
							Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				20 Unit	1.192.999.280,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	20 unit	1.500.000.000,00
	x	xx	01	1.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah				1 dokumen	1.298.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		1 dokume	1.603.000.000,00
	x	xx	01	1.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat													
							Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 laporan	8.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 laporan	3.000.000,00
	x	xx	01	1.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik													
							Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				2 laporan	190.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	2 laporan	200.000.000,00
	x	xx	01	1.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor													

							Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				1 laporan	1.100.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 laporan	1.400.000.000,00
	x	xx	01	1.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara				20 Unit	1.442.327.606,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		20 unit	700.000.000,00
	x	xx	01	1.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan													
							Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				20 Unit	800.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	20 unit	300.000.000,00
	x	xx	01	1.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya													
							Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				25 Unit	130.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	25 unit	300.000.000,00
	x	xx	01	1.09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya													
							Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	512.327.606,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		2 unit	100.000.000,00
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL (Meningkatnya potensi dan peluang penanaman modal dan kemudahan berusaha)	Jumlah Peta Potensi Investasi Jumlah UMKM yang difasilitasi Bekerjasama dengan Usaha Besar	1 dokumen 2 dokumen	- 0	- 0	1 dokumen 2 dokumen	699.998.500,00						2 dokumen 2 dokumen	275.000.000,00
	2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kemitraan yang Difasilitasi	-			2 Dokumen	299.999.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Investor	2 dokumen	100.000.000,00
	2	18	02	1.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi													

							Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				2 Dokumen	299.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Investor	2 dokumen	100.000.000,00
	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha	-			1 Dokumen	399.999.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Investor	2 dokumen	175.000.000,00
	2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi													
							Jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi				1 Dokumen	399.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Investor	1 dokumen	175.000.000,00
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL [Meningkatnya Pemasaran Penanaman Modal di Provinsi Bali]	Persentase Peningkatan Investor Yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali	23,08 persen	14,92 persen	-	16.92 Persen	879.000.000,00						18,46 persen	350.000.000,00
	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Publikasi Promosi Penanaman Modal	-			2 Dokumen	879.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat dan Investor	2 dokumen	350.000.000,00
	2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi													
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	529.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat dan Investor	1 dokumen	250.000.000,00

	2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi													
							Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat dan Investor	1 dokumen	100.000.000,00
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL [Meningkatnya Pelayanan dan Pengawasan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan serta Penanganan Pengaduan]	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	558.737.740,00						100 persen	945.000.000,00
	2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang Terbit sesuai Kewenangan Provinsi	-			100 Persen	558.737.740,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemohon Izin	100 persen	945.000.000,00
	2	18	04	1.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
							Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik				400 pelaku usaha	410.482.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemohon Izin	405 pelaku usaha	644.000.000,00
	2	18	04	1.01	0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko													
							Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik				10 pelaku usaha	148.255.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemohon Izin	11 pelaku usaha	301.000.000,00
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL [Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal]	Realisasi Investasi	16,66 Triliun	36,52 Triliun	-	13.2 Triliun	923.605.940,00						14,00 Triliun	750.000.000,00

	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal	-			93 Persen	923.605.940,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Pelaku Usaha	93 persen	750.000.000,00
	2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal													
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				18 Kegiatan usaha	416.578.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Pelaku Usaha	20 kegiatan usaha	300.000.000,00
	2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				13 Kegiatan usaha	256.845.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Pelaku Usaha	15 kegiatan usaha	187.500.000,00
	2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
							Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko				40 pelaku usaha	250.182.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Pelaku Usaha	60 pelaku usaha	262.500.000,00
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL [Meningkatnya Data dan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan]	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	352.999.700,00						100 persen	288.530.361,00

	2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi				2 dokumen	352.999.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat & Aparatur	2 dokumen	288.530.361,00
	2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	352.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat & Aparatur	2 dokumen	288.530.361,00